

## MENGUKUR KONTRIBUSI SISWA DALAM KEMACETAN KOTA

Oleh : Mukhlis Mustofa

*Abstract*

*Student mobility in accessing education services is a consequence of children's rights. The amount of fulfillment to use this transport proposition effect on the traffic conditions of a region. How effective ban on students bringing the motor to a standstill pengatasan city the main problem behind the high interest of local governments to prohibit driving this motorcycle. This student-based settings such vehicles, transport subsidy-based students, Application BOS student transportation and special attention on the part of school-related student transportation access*

Mobilitas siswa dalam mengakses layanan pendidikan merupakan konsekuensi pemenuhan hak asasi anak. Beragam sarana transportasi yang digunakan siswa dalam aksesibilitas layanan pendidikan ini berimplikasi pada perubahan tatanan transportasi sebuah kota. Besarnya pemenuhan untuk menggunakan sarana transportasi ini berpengaruh pada kondisi lalu lintas sebuah wilayah. Peningkatan kemacetan dan peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan konsekuensi aksesibilitas siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Pilihan penggunaan sarana transportasi pada siswa menjadikan beragam moda transportasi dimanfaatkan untuk mobilisasi massal siswa. Penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi untuk aksesibilitas menjadi kaidah umum dalam mendukung mobilitas siswa ini. Penggunaan beragam model angkutan ini sedikit banyak akan berpengaruh pada pemanfaatan sarana dan prasarana lalu lintas. Penggunaan bis khusus, larangan penggunaan alat transportasi tertentu oleh siswa dapat disikapi secara beragam.

Larangan siswa untuk membawa sepeda motor ke sekolah mulai tahun ajaran baru di kota Solo memunculkan asa mendalam bagi terciptanya kelancaran lalu

lintas kota. Pelarangan ini menimbulkan beragam dampak baik dampak sosial maupun dampak pembelajaran. Permasalahan ini banyak ditemukan di banyak kota di Jawa tengah utamanya kota dengan tingkat perkembangan tinggi.

Ditelaah lebih mendalam sebenarnya kebijakan ini lebih banyak bernuansa pengkambinghitaman siswa sebagai sumber kemacetan. Sebagai permisalan dari jumlah penduduk Solo pada tahun 2010 sebesar 503.421 jiwa jumlah siswanya 68. 153 siswa. Hitung-hitungannya populasi siswa tersebut tidak signifikan dalam menyumbang kemacetan kota. Riilnya jumlah siswa yang membawa sepeda motor saat ini masih dibawah angka 10.000 siswa dan tidak bisa dianggap sebagai salah siswa.

Mencermati data diatas layaklah jika ruwetnya lalu lintas kota Solo dan sebagian besar kota di Jawa tengah tidak sepenuhnya menjadi beban siswa, tingginya mobilitas warga didalamnya justru berkontribusi lebih besar dalam memacetkan kota ini. Hitung-hitungannya mobilitas siswa justru teramat terbatas pada waktu-waktu tertentu, dibandingkan warga lain justru siswa lebih mudah ditata dikarenakan kepastian mobilitasnya. Tulisan ini bukan sekedar pembelaan pada siswa bermotor namun lebih banyak pada penelaahan permasalahan

secara konstruktif dan meminimalisir pengkambinghitaman salah satu komponen kota.

Larangan siswa menggunakan sepeda motor ini menjadi salah satu contoh pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan keberadaan siswa mengakses fasilitas umum. Seberapa efektifkah larangan siswa membawa motor dalam pengatasan macet kota menjadi permasalahan utama dibalik tingginya minat pemerintah setempat untuk melakukan pelarangan pengendaraan sepeda motor ini. Kebijakan ini lebih banyak unsur politisasi spektakuler dibandingkan realitas di lapangan.

### ***Sarana Protes***

Sepeda motor dalam pola lalu lintas merupakan sarana yang dianggap lebih cepat dalam mengakses suatu wilayah. Pemanfaatan sepeda motor ini digunakan seluruh komponen masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan. Dalam mengakses sarana pendidikan keberadaan sepeda motor dianggap lebih efisien dikarenakan tidak memakan banyak median jalan. siswa pun kerap kali ditemukan menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi pembelajarannya.

Penggunaan sepeda motor besar – besaran merupakan hal baru pada pola pembelajaran saat ini. Kondisi ini merupakan pergeseran mengingat pada masa lalu siswa lebih banya menggunakan angkutan umum untuk menuju ke sekolahnya. Ditarik lebih jauh siswa pada masa lalu justru memiliki kebanggaan menggunakan sepeda untuk menuju ke sekolahnya dengan alasan kepraktisan dan gengsinya. Siswa pada jenjang pendidikan menengah secara kuantitas lebih banyak menggunakan sepeda motor ini disebabkan dengan pandangan efisien tersebut.

Keberadaan Siswa untuk membawa motor ke sekolah selama ini merupakan wujud protes tidak adanya keberpihakan

angkutan massal memadai dan terkoneksi dalam sebuah kota. Sepeda motor menjadi solusi serba pragmatis manakala ketersediaan angkutan umum tidak sesuai harapan. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan siswa semata, bahkan pada elemen masyarakat lain penggunaan sepeda motor ini sedemikian masifnya seiring perkembangan kota.

Beragam solusi penataan lalu lintas sendiri pada akhirnya belum sepenuhnya menekan kemacetan kota sehingga formulasi penataannya menysasar pada semua pihak. Dengan beragam penekanan posisi siswa menjadi posisi paling empuk untuk merealisasikan penataan lalu lintas ini. Secara kasat mata besaran siswa yang menggunakan sepeda motor dalam sarana transportasinya dianggap signifikan dalam berkontribusi memacetkan kota.

Penggunaan sepeda motor dalam mengakses sarana pendidikan merupakan pilihan teramat sulit ditengah minimnya ketersediaan sarana transportasi umum. Dari hati terdalam jika disuruh memilih, maka siswa memilih angkutan umum untuk beraktifitas namun koneksitas antar komponen belum sepenuhnya memadai. Romantisme masa lalu menyuguhkan betapa transportasi umum ini lekat dengan kondisi siswa. Riilnya ditengah carut marut kemacetan mereka masih dituding penyumbang kemacetan utama kota tercinta.

Pemenuhan kebutuhan elementer siswa membutuhkan sarana transportasi memadai untuk pemenuhannya. Ilustrasinya kebutuhan siswa tidak semata-mata pergi ke sekolah di pagi hari, setelah sekolah banyak ditemukan siswa menambah pembelajarannya dalam beragam bentuk dan memerlukan sarana pendukung. Dirunut lebih mendalam mobilitas tinggi siswa semakin bertambah manakala dikaitkan posisi geografis.

Penggunaan sepeda motor bagi siswa sendiri dianggap menjawab tuntutan untuk

mobilitas siswa. Untuk kota solo sendiri banyak ditemukan siswa bersekolah di manahan namun menambah les privat di kartasura ataupun siswa berdomisili di palur bersekolah di margoyudan. Kebijakan larangan siswa membawa motor ini secara tidak langsung mengurangi hak warga negara dalam menuntut ilmu dan mengingkari upaya pencerdasan anak bangsa.

Rumitnya pengatasan permasalahan kemacetan di kota selayaknya menyadarkan banyak khalayak bahwa kemacet tidak selamanya oleh siswa. Sejujurnya parahnya kemacetan kota justru muncul sepanjang waktu dan tidak sebatas saat jam masuk siswa. Berdasarkan pengamatan, sesaat setelah jam masuk siswa justru kemacetan semakin menjadi-jadi.

Pengatasan permasalahan kemacetan dengan pelarangan siswa membawa sepeda motor secara tidak langsung memposisikan kucing-kucingan kebijakan tiada ujung. Pelarangan penggunaan sepeda motor dihadapkan dengan perkembangan pengetahuan siswa akan menuai masalah berkepanjangan. Siswa saat ini sudah terposisikan sebagai manusia cerdas sehingga jika kebijakan tersebut menyentuh mereka maka dengan serta merta melakukan penolakan.

Permasalahan kemacetan lalu lintas tidaklah arif jika hanya menuding salah satu pihak menjadi biang kemacetan dibandingkan pihak lain. Pengalihan tudingan siapa penyebab utama kemacetan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan lalu lintas. Menyibak keterkaitan Terdapat beberapa solusi berkaitan pengaturan lalu lintas berbasis siswa agar tidak menimbulkan kebiasaan kebijakan. Pengaturan berbasis siswa ini diantaranya

*Subsidi angkutan berbasis siswa* menjadi langkah praktis manakala siswa digiring untuk menggunakan angkutan

umum untuk mendukung mobilitasnya. Pendapat ini disebabkan untuk mencipatakan angkutan khusus bagi siswa memerlukan pembiayaan yang besar. Angkutan berbasis siswa ini diberlakukan dengan memanfaatkan moda transportasi yang sudah ada selama ini.

Secara teknis kebijakan ini sebenarnya sudah berlangsung namun belum mendapat payung hukum resmi. Kerjasama sinergis antar instansi terkait sangat mutlak diberlakukan untuk memberikan payung hukum resmi. Bentuk kerjasama ini bisa diberlakukan tarif khusus ini diberikan tidak hanya ketika siswa pulang atau pergi kesekolah namun berlaku sepanjang waktu selama siswa mampu menunjukkan bukti diri.

Upaya lain pengatasan permasalahan pengangkutan siswa dapat diberlakukan dengan *Penerapan BOS transportasi siswa*. Penerapan kebijakan ini menjadi komponen penting mengingat pembiayaan pendidikan tidak sepenuhnya sebatas kebutuhan pembelajaran Riilnya penerapan BOS transportasi ini dapat diberlakukan dengan beragam bentuk. Teknisnya pengucuran bantuan ini berupa voucher mengakses angkutan massal. Penerapan kebijakan ini secara tidak langsung akan menjawab keresahan pengusaha angkutan akan semakin minimnya penumpang.

Tidak kalah pentingnya *perhatian khusus dari pihak sekolah berkaitan akses transportasi siswa* harus lebih dikuatkan. Secara berkala sekolah perlu melibatkan diri dalam pengaturan sarana transportasi terutama kelengkapan siswa berlalu lintas. Selayaknya sekolah yang menyediakan lahan parkir bagi siswanya menerapkan aturan ketat berkaitan kelengkapan berkendara siswa. Jika siswa tidak mampu menunjukkan SIM selayaknya langkah tegas diambil untuk siswa bersangkutan terutama berkaitan pendidikan kedisiplinan. Sekolah sendiri dapat memposisikan menjadi gerakan moral kembali ke angkutan umum

dan jika diperlukan dapat diberlakukan one day with general bus selain satu hari bersepeda.

Mobilitas siswa merupakan sebuah konsekuensi logis dalam pemenuhan kebutuhan elementernya di bidang pendidikan. Sangatlah tidak layak jika siswa yang menjadi kambing hitam manakala kemacetan semakin menjadi-jadi.

Dorongan siswa untuk menggunakan sarana transportasi secara lebih bijak menjadi sebuah langkah maju dan menjadikan sekolah bukan semata – mata tempat menuntut ilmu namun menambah romantisme masa muda tak terlupakan.

## Daftar Pustaka

Aminatul Zahroh, 2014, *Total Quality Management, Teori dan Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media

Daldjoeni, 1992, *Geografi Baru, Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni

Hartanti, 2011, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo

Oding Supriadi, 2013, *Perkembangan Peserta Didik*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta